

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Masyarakat sangat membutuhkan jasa perbankan, dimana bank merupakan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan sebagai tempat untuk peminjaman dana bagi masyarakat yang kekurangan dana (*defisit unit*). Selain dibutuhkan oleh individu atau masyarakat perbankan juga sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Berdasarkan berbagai peran perbankan yang sangat strategis tersebut, maka perbankan harus menjaga betapa pentingnya tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan perbankan dapat terlihat dari laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen bank. Pihak manajemen perbankan harus melakukan perhitungan tingkat kesehatan banknya setiap periode. Untuk perbankan yang sudah melakukan penilaian sebelumnya dapat dijadikan penilaian apakah terdapat peningkatan atau malah penurunan dalam kesehatan banknya.

Bagi perbankan yang mengalami peningkatan dalam penilaian kesehatannya secara terus menerus, hal tersebut tentu tidak menjadi masalah, karena hal inilah yang diharapkan oleh bank dan harus tetap dipertahankan, namun bagi perbankan yang secara terus-menerus mengalami tingkat kesehatan yang rendah, maka akan mendapatkan pengarahannya atau bahkan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di Pulau Sumatera meliputi Bank Lampung, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, Bank Sumatera Barat, Bank Bengkulu, dan Bank Sumatera Utara.

Setiap perbankan wajib melakukan fungsi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan, selaku pengawas dan Pembina bank nasional Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang bagaimana penilaian tingkat kesehatan bank melalui surat edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 mei 1993, yang dikenal dengan nama metode CAMEL yang terdiri dari *capital adequacy, quality of productive asset, management risks, earning, liquidity*. Kemudian cara bagaimana penilaian tingkat kesehatan perbankan tersebut diperbaharui lagi melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR/1997, tanggal 30 April 1997.

Penilaian CAMEL dilakukan terhadap beberapa komponen yang meliputi: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk melakukan penilaian terhadap faktor modal, kemudian *Non Performing Loan* (NPL) untuk melakukan penilaian terhadap kredit bermasalah, penilaian terhadap BOPO untuk menilai kinerja manajemen, penilaian terhadap *Return On Aset* (ROA) untuk menilai keuntungan bank, penilaian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk penilaian likuiditas. sebuah bank akan mengalami kesulitan jika mengalami satu permasalahan saja pada faktor tersebut.

Bila *Capital Adequacy Ratio* yang dimiliki oleh suatu perbankan semakin meningkat, akan berdampak pada risiko yang dialami bank akan menurun dan kemudian keuntungan bank akan bertambah (Yuliani, 2007). *Return On Aset*

menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan, dalam hal yang berhubungan dengan masalah penyaluran kredit (Hadad, 2004). Hamonangan dan Hasan (2009) berpendapat bahwa yang menunjukkan besaran jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat berasal dari dana pihak ketiga merupakan komponen dari *Loan to Deposit Ratio*.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan tingkat kesehatan suatu perbankan salah satunya dilakukan oleh Surifah (1999), Wilopo (2001), Almilia dan Winny (2005) dimana mereka melakukan pengujian manfaat rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan bank dengan menggunakan model CAMELS. Hasilnya diperoleh bahwa rasio keuangan yang terdapat dalam CAMELS cukup akurat dalam menyusun *rating* suatu perbankan.

Almilia dan Herdiningtyas (2005) juga melakukan penelitian tentang suatu tingkat kegagalan bisnis dan tingkat kebangkrutan suatu bank dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam model CAMELS. Diperoleh hasil: (1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kondisi bermasalah, (2) Aktiva Produktif Bermasalah (APB), *Return on Asset* (ROA) dan *Net Income Margin* (NIM) memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap kondisi bermasalah, (3) *Non Performing Loan* (NPL), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Aktiva Produktif (PPAPAP) memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap kondisi bermasalah, (4) Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kondisi bermasalah.

Lestari (2008) melakukan penelitian mengenai tingkat kesehatan perbankan pemerintah, dimana diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan rasio-rasio yang terdapat pada metode CAMELS ada 2 bank dalam 3 periode yang memperoleh predikat tidak sehat (PT Bank Tabungan Negara pada tahun 2008 dan PT BPD Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 dan 2008).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang tingkat kesehatan perbankan bertujuan untuk menekan kewajiban perbankan dalam menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia serta menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Melalui Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah No.68/1996 mengenai tiga unsur yang wajib dimiliki oleh industri perbankan nasional, meliputi:

1. Memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8% melalui aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR), berubah menjadi 10% pada akhir tahun 1997 dan kemudian menjadi 12% pada tahun 2001;
2. Menetapkan besarnya jumlah modal disetor menjadi Rp 50 miliar untuk perbankan umum nondevisa dan sebesar Rp 150 miliar untuk perbankan devisa;
3. Memiliki giro wajib minimum (GWM) sebelumnya 3% meningkat menjadi 5% per April 1997.

Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) selama ini dalam penilaian Bank Indonesia (BI) dalam kategori belum memuaskan. Hal ini dikarenakan pada indikator-indikator yang harus dimiliki oleh BPD masih terdapat hal-hal yang belum memuaskan bank sentral. Menurut perhitungan Statistik Perbankan

Indonesia (SPI) per September 2012, besarnya aset yang dimiliki oleh BPD hanya sebesar 9,62% dari total semua perbankan nasional. Kemudian dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK), hanya hanya memiliki nilai sebesar 11,14 % dari total DPK seluruh perbankan nasional. Selanjutnya dalam hal kredit, hanya memiliki pangsa pasarnya 8,47% dari seluruh total penyaluran pembiayaan perbankan. Hal ini masih kalah jauh dibandingkan dengan perbankan nasional,

Dalam hal Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) hanya ada 17 perbankan yang sudah memenuhi maksimal sebesar 75 persen. Sedangkan rasio Net Interest Margin (NIM) hanya ada tiga bank yang memenuhi nilainya maksimal 5,5%. Oleh sebab itu, maka Bank Pembangunan Daerah harus mampu untuk menjadi BPD Regional Champion (BRC). Pada kondisi saat ini ada beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian serius dari BPD terkait pemenuhan kriteria BRC.

Selain hal tersebut BPD harus memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan penguatan permodalan, perluasan akses keuangan masyarakat, penguatan struktur pendanaan BPD dan peningkatan kontribusi perekonomian yang dapat dilakukan dengan peningkatan komposisi kredit produktif. Dalam hal mengantisipasi masalah tersebut, Bank Indonesia wajib meningkatkan komitmen untuk penguatan permodalan BPD, memperluas penetrasi jaringan kantor melalui aliansi strategis layanan jasa perbankan dengan lembaga lain yang memiliki jaringan luas. BPD harus mampu melakukan peningkatan *customer based retail* sebagai sumber pendanaan BPD yang relatif stabil dan terdiversifikasi. Dimana hasilnya BPD tidak hanya bergantung pada

pendanaan dari Pemda. Kemudian melakukan sinergi kerjasama BPD dengan BPR dalam pelaksanaan Apex Bank dan linkage program. Selanjutnya dukungan BPD pada sektor unggulan – unggulan yang ada di daerah guna meningkatkan komposisi kredit produktif BPD.

Peningkatan jumlah aset dan dana pihak ketiga yang ada di BPD tidak dapat dianggap remeh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencatatan, dimana total aset yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai dengan Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar 13,01% (yoy) dari semula sebesar Rp 389,964 triliun meningkat menjadi Rp 440,691 triliun, dimana hanya berada sedikit di bawah sektor industri yang pertumbuhannya mencapai 13,34 %.

Peningkatan ini dampak dari meningkatnya total DPK yang mengalami kenaikan sebesar 16,77% dari semula sebesar Rp 287,709 triliun menjadi sebesar Rp 335,957 triliun, jumlah ini lebih tinggi dari sektor industri yang hanya sebesar 12,29%. Kuartal I pada Tahun 2015, total aset BPD sebesar Rp 498 triliun, total kredit sebesar Rp 304 triliun, dan total DPK sebesar Rp 410 triliun. Kemudian total kredit BPD sepanjang Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 13,95% dari semula sebesar Rp 264,541 triliun meningkat menjadi sebesar Rp 301,456 triliun, lebih tinggi dari peningkatan sektor industri sebesar 11,65%, dimana sebagian besar masih dalam bentuk kredit konsumtif sebesar 68 persen.

Walaupun begitu, kiprah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam dunia perbankan nasional masih terlihat sangat minim. Dimana Aset, permodalan, dan penyaluran kredit BPD masih sangat tertinggal jauh dengan bank swasta dan bank milik pemerintah pusat (BUMN) lainnya. Masalah lain yang dihadapi adalah

terbatasnya jaringan kantor dan masih rendahnya kredit produktif yang disalurkan Bank Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera?
2. Apakah *quality of productive asset* (NPL) berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera?
3. Apakah *management risks* (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera?
4. Apakah *earning* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera?
5. Apakah *liquidity* (LDR) berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera?
6. Apakah CAR, NPL, BOPO, ROA dan LDR berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh *quality of productive asset* (NPL) terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh *management risks* (BOPO) terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh *earning* (ROA) terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera.
5. Untuk mengetahui pengaruh *liquidity* (LDR) terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera.
6. Untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROA dan LDR terhadap tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan penulis dalam melakukan penilaian kinerja keuangan bank khususnya menggunakan analisis CAMEL.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada BPD mengenai tingkat kesehatannya, sehingga dapat mengambil kebijakan untuk menjaga tingkat kesehatannya.

3. Bagi Investor

Diharapkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan mengukur kemampuan BPD dalam kemampuan memberikan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan pada Bank tersebut.